

Pendidikan Kewarganegaraan (CITIZENSHIP) - SKS 2(2-0)

Dosen Pengajar :
Suhermanto SH, MH

- Staf Pengajar Fakultas Hukum pada Universitas Pakuan Bogor.
- Telp/Fax : 0251-8373588
- HP. 0813 1414 2900, 0857 1151 5145, 0251 2144 799
- Pendidikan S1 Fak Hukum Unpak, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara

KALENDER AKADEMIK

AWAL KULIAH : 19 Januari 2009

AKHIR KULIAH : 2009

UTS : 2009

UAS : 2009

Hasil Ujian : akan diumumkan oleh
koordinator setelah
semua nilai kelas
terkumpul.

PERATURAN PERKULIAHAN

- Perkuliahan (2 SKS): 100 menit per minggu
- Tata Tertib Kuliah: Lihat ketentuan yang berlaku di BSM.
- Perkuliahan akan diselenggarakan berupa penyampaian materi, pre-test, dan pemberian tugas menyusun makalah

POKOK BAHASAN KULIAH

I. PENDAHULUAN

II. IDENTITAS NASIONAL

III. KESADARAN BELA NEGARA

IV. PELAKSANAAN DAN AMANDEMEN & UUD 1945

V. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN ETIKA POLITIK

VI. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI, DASAR NEGARA DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

VII. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

POKOK BAHASAN (Lanjutan)

VIII. GEOPOLITIK INDONESIA

IX. GEOSTRATEGI INDONESIA

X. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

XI. KEWARGANEGARAAN DAN HAM

XII. HUKUM, DEMOKRASI DAN MASYARAKAT
MADANI

XIII. OTONOMI DAERAH

XIV. LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN KOLOKIUUM

Kolokium (1 SKS): 100 menit per minggu

Tata Tertib Kolokium:

- Setiap mahasiswa wajib hadir dalam kolokium 100 %
- Jika berhalangan hadir, mahasiswa harus menunjukkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dosen akan mempertimbangkan kehadiran pengganti dengan mengikuti kolokium pada kelompok lain
- Jika mahasiswa berhalangan hadir pada penyajian kelompoknya, dosen dapat mempertimbangkan untuk ikut dalam penyajian kelompok kecil lainnya pada kelas kelompok kolokium yang sama.

PENILAIAN

UTS : 35 PERSEN


UAS : 35 PERSEN

Tugas &Pre-test: 30 PERSEN

HURUF MUTU : sesuai ketentuan di BSM

DESKRIPSI MATA KULIAH

Membahas tentang pemahaman dan penerapan nilai-nilai fundamental bangsa dan negara, dalam upaya menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan peserta didik sebagai generasi penerus, serta mampu bersikap proaktif terhadap perubahan yang terjadi guna mewujudkan keterpaduan ipteks dan pembangunan.



TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Peserta didik mampu menjelaskan tentang permasalahan kenegaraan yang menyangkut paradigma nasional dalam rangka memantapkan ketahanan nasional, dan sekaligus mampu menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, bersikap demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

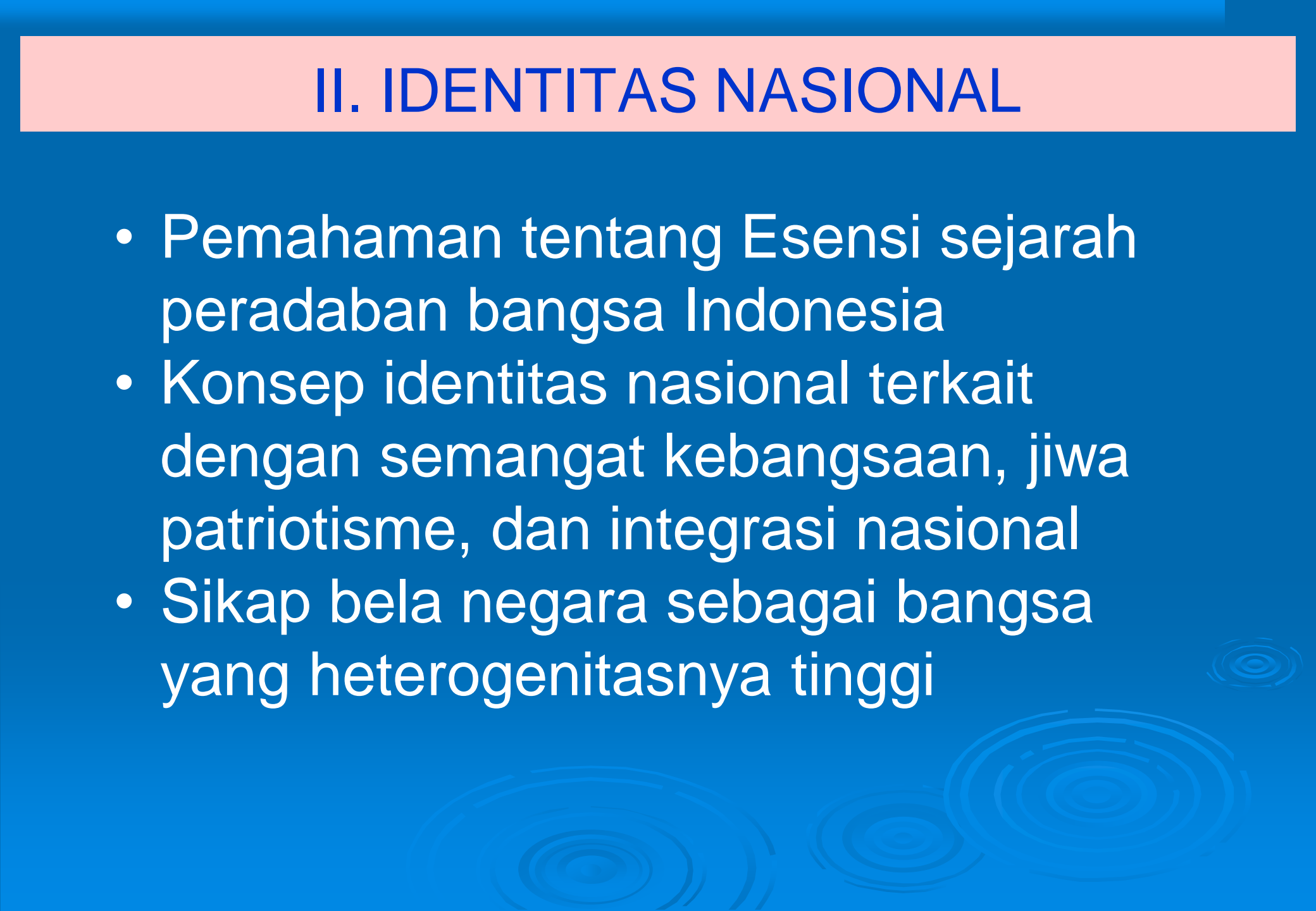
I. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang : Landasan dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Mengacu pada :
UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

SK Dirjen Dikti Depdiknas RI
No. 43/DIKTI/Kep/2006
Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

II. IDENTITAS NASIONAL

- Pemahaman tentang Esensi sejarah peradaban bangsa Indonesia
 - Konsep identitas nasional terkait dengan semangat kebangsaan, jiwa patriotisme, dan integrasi nasional
 - Sikap bela negara sebagai bangsa yang heterogenitasnya tinggi
- 

III. KESADARAN BELA NEGARA

Pemahaman tentang :

- Wawasan dan pengertian bela negara
- Hak dan kewajiban bela negara
- Implementasi bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara

IV. PELAKSANAAN DAN AMANDEMEN UUD 1945

Penjelaskan dan pemahaman tentang :

- Karakteristik, status dan fungsi UUD 1945
- Proses tersusunnya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
- Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945
- Amandemen UUD 45

V. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT & ETIKA POLITIK

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Definisi filsafat, etika politik, nilai, norma, dan moralitas
- Pancasila sebagai sistem filsafat
- Pancasila sebagai nilai etika politik

VI. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI, DASAR NEGARA, DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Pancasila dalam konstitusi negara
- Pancasila sebagai paradigma pembangunan

VII. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Konsep sistem pemerintahan Indonesia
- Dasar hubungan UUD 1945 dan bentuk NKRI
- Pelaksanaan UUD 1945 sampai saat ini
- Proses dan hasil Amandemen UUD 1945

VIII. GEOPOLITIK INDONESIA

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Perkembangan Geopolitik dan teori-teori geopolitik
- Konsep wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional
- Geopolitik dan hukum kewilayahan dan pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara

IX. GEOSTRATEGI INDONESIA

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Pengertian Ketahanan Nasional
- Konsepsi dasar Ketahanan Nasional
- Membangun Asta Gatra Ketahanan Nasional

X. POLSTRANAS

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Pengertian, dasar pemikiran, dan stratifikasi POLSTRANAS
- Politik Nasional dan Implementasi Politik dan Strategi nasional di bidang pembangunan nasional

XI. KEWARGANEGARAAN DAN HAM

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Pengertian dan dasar hukum warga negara
- Hak dan kewajiban warga negara
- Pengertian dan dasar pemikiran HAM
- Perkembangan HAM di dunia
- Perkembangan HAM di Indonesia

XII. HUKUM, DEMOKRASI dan MASYARAKAT MADANI

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Penegakan Hukum
- Membangun Demokrasi
- Membangun Masyarakat Madani yang adil dan makmur

XIII. OTONOMI DAERAH

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Hakekat, arti penting dan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah
- Pokok-pokok Urusan Otonomi Daerah
- Pokok-pokok perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

XIV. LINGKUNGAN HIDUP

Penjelasan dan pemahaman tentang :

- Pengertian Lingkungan Hidup
- Benturan Tata Lingkung
- Dampak Lingkungan Hidup
- Kerusakan Lingkungan Hidup
- Perhatian dunia atas Lingkungan Hidup di Indonesia

I. PENDAHULUAN



VISI

UU No.20 tahun 2003: Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

VISI

Pasal 1 SK Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006: Sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

MISI

UU No.20 tahun 2003, antara lain :
"Meningkatkan kesiapan masukan
dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan
kepribadian yang bermoral".

MISI

Pasal 2 SK Dirjen Dikti Depdiknas RI
No. 43/DIKTI/Kep/2006 :

Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air Sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab Kemanusiaan

STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL

Strategi pembaharuan Sisdiknas, antara lain dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi.

Pada UU No.20 tahun 2003 Pasal 37 disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan Agama, **Kewarganegaraan**, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Jasmani dan Olahraga, Keterampilan dan Kejuruan, dan Muatan lokal.

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

TUJUAN PENDIDIKAN Kewarganegaraan (1)

**MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA
INDONESIA, YAITU :**

MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA
TERHADAP TUHAN YME, BERBUDI LUHUR,
BERKEPRIBADIAN, MANDIRI, MAJU,
TANGGUH, CERDAS, KREATIF, TERAMPIL,
BERDISIPLIN, BERETOS KERJA,
PROFESIONAL, BERTANGGUNG JAWAB,
PRODUKTIF, SERTA SEHAT JASMANI DAN
ROHANI

TUJUAN PENDIDIKAN Kewarganegaraan (2)

- MENUMBUHKAN JIWA PATRIOTIK,
- MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR,
- MENINGKATKAN SEMANGAT KEBANGSAAN,
- MENINGKATKAN KESETIAKAWANAN SOSIAL,
- MENINGKATKAN KESADARAN PADA SEJARAH,
- MENINGKATKAN SIKAP MENGHARGAI JASA PARA PAHLAWAN,
- BERORIENTASI KE MASA DEPAN.

TUJUAN PENDIDIKAN Kewarganegaraan (3)

Untuk hidup berguna dan bermakna perlu memiliki bekal IPTEKS berlandaskan pada nilai-nilai **Pancasila, Keagamaan dan Perjuangan bangsa.**

- NILAI-NILAI TSB MENJADI PEDOMAN dan KEYAKINAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA dan BERNEGARA DI INDONESIA
- * Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, Wasantara, Tannas dalam diri individu.
- * Kualitas Warga Negara ditentukan oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping derajat penguasaan lpteks.

HAKEKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Mahasiswa mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika **BUDAYA, BANGSA, NEGARA**, dan **HUBUNGAN INTERNASIONAL**.

- upaya menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus secara berguna (kemampuan spiritual) dan bermakna (kemampuan kognitif & psikomotorik)
- Mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, pola tindak yang mencintai tanah air berdasarkan PANCASILA.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (1)

1. Masuk dalam Kurikulum DIKTI – UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. UU No.3 Tahun 2002 tentang HANNEG
 - Gambaran semangat dan upaya perjuangan kaum terpelajar untuk turut membela dan menegakkan NKRI, serta tekad untuk melanjutkan dan melestarikannya pada masa kini dan masa depan melalui upaya sosialisasi pada program DIKNAS.
 - **Prioritas Program Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan**

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (2)

3. Periode perang kemerdekaan (1945- 1949):
Satuan Tentara Pelajar TRI P (Tentara Republik Indonesia Pelajar); Corps Mahasiswa dan Brigade 17.
4. Periode Menghadapi Gangguan Keamanan Negara, karena berbagai pemberontakan, perjuangan merebut Irian Barat dari penjajah belanda, DWIKORA (UU No. 29 Tahun 1945 tentang HANNEG)

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (3)

5. Ikut berpartisipasi, mempersiapkan diri secara mental dan fisik melalui kegiatan latihan kemiliteran Mahasiswa (LKM) dan LKD yang bersifat individual, belum terkait pada Organisasi Perguruan Tinggi (PT).
6. Tahun 1968 DepHan dan DepDikBud : Walawa (= Reserve Officer Training Center) di 8 PTN (UI, UNPAD, UGM, Unair, Unsri, Unbra. Unhas, USU) → sifatnya ekstra kurikuler

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (4)

7. Tahun 1973, karena kondisi keuangan Negara prihatin, Walawa dihentikan, diganti Latihan Kemiliteran untuk persiapan perwira Cadangan TNI (DepHan).
Di PT : Pendidikan Kewiraan (awalnya di 8 PTN)
8. UU No.2 Tahun 1989 Psl 39 : Pendidikan Kewiraan sebagai bagian dari pendidikan Kewarganegaraan
9. Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN, Pembangunan 5 tahun ke-6 menegaskan kembali pembinaan dan pengembangan Kurikulum dan isi pendidikan : Pendidikan PS, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraa

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (5)

10. Era ORBA di bidang Pertahanan & Keamanan: UU No. 20 Tahun 1982 diganti dengan UU No.3 Tahun 2002 tentang HANNEG. Pada pasal 9 :
- a. Setiap WN berhak dan wajib ikutserta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Hanneg
 - b. Butir a dilaksanakan melalui pendidikan Kewarganegaraan, Latihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, Pengabdian sesuai profesi
 - c. Butir b diatur oleh UU

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (6)

11. Era ORBA di bidang DikNas: UU No.2 Tahun 1989 diganti dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang SisDikNas. Pasal 37 : Pendidikan WN merupakan kurikulum Dikti yg bersifat Wajib, bersama-sama dengan pendidikan Agama dan Bahasa. Ketentuan diatur dengan PP.
- Pendidikan Kewarganegaraan diakomodasikan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Petahanan Negara (HANNEG) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SisDikNas : harus diupayakan peningkatan dan pemantapan kuantitas dan kualitas dosen yang profesional.

PENUTUP (1)

1. Pendidikan Kewarganegaraan di PT merupakan bagian dari SISDIKNAS, dan digunakan sebagai wahana untuk membentuk sikap mental manusia pembangunan, disamping memperluas cakrawala berpikir mahasiswa sebagai WN yang mengemban tanggungjawab menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara, demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional.

PENUTUP (2)

2. Di IPB, PPKn sebagai Mata Kuliah pengembangan kepribadian menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya, dengan tujuan mahasiswa mampu **mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ipteks yang dimilikinya dengan rasa tanggungjawab.**

PENUTUP (3)

3. Kompetensinya bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berperan dengan luas sebagai manusia intelektual.
4. Materi PPKn tidak cukup hanya dipelajari dan diujikan dengan memberi **nilai kuantitatif**, tetapi lebih penting adalah hasil **kualitatif** dalam bentuk **aplikasi nilai-nilai materi** pendidikan ke dalam hidup sehari-hari atau profesi masing-masing, sebagai generasi penerus atau pemimpin bangsa masa depan.

PENUTUP (4)

5. PPKn merupakan strategi dasar untuk membentuk ketahanan nasional

Kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan bangsa dan negara, dapat diharapkan tercapainya keberhasilan pembangun nasional selanjutnya akan meningkatkan ketahanan nasional

CAMKAN :

Sejarah kehidupan manusia mengajarkan :
BERAKAL TANPA BUDI → BERBAHAYA
BERBUDI TANPA AKAL → BERHENTI
BERAKAL DAN BERBUDI → BIJAKSANA



Terima Kasih Atas Perhatiannya